KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2025
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Romi Yudianto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	4
II.	Neraca	5
III.	Laporan Operasional	6
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	7
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	8
	A. Penjelasan Umum	8
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	37
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	54
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI.	Lampiran dan Daftar	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 A, Cawang – Jakarta Timur 13630
Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928
Laman : kumham-jakarta.info & jakarta.kemenkumham.go.id
E-mail : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Romi Yudianto

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3,997,559,200 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4,016,866,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3,957,971,800 sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp3,957,971,800. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 3,957,971,800 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit) -LO sebesar Rp 3,957,971,800.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(3,957,971,800 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp(3,957,971,800 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Barang	B.4	4.012.866.000	3.957.971.800	98,63	3.687.884.600
Belanja Modal	B.5	4.000.000	3.935.000	98,38	3.991.500
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		**4.016.866.000**	**3.961.906.800**	98,63	**3.691.876.100**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		-
Piutang Bukan Pajak	C.4		-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10		
Persediaan yang Belum Diregister	C.11	-	
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14		-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15		
Peralatan dan Mesin	C.16		
Gedung dan Bangunan	C.17		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19		
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21		
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22		
Aset Lain-Lain	C.23		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24		
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26		
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28		
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.29		
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30		-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.31		
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(*Dalam Rupiah*)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Paja	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		
Beban Persediaan	D.3		
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.711.241.800	3.474.439.300
Beban Pemeliharaan	D.5		
Beban Perjalanan	D.6	246.730.000	213.445.300
Beban Barang untuk Diserahkar	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan	D.9		
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10		-
JUMLAH BEBAN		**3.957.971.800**	3.687.884.600
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.957.971.800)	(3.687.884.600)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lair		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.957.971.800)	(3.687.884.600)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(3.957.971.800)**	**(3.687.884.600)**

Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(3.957.971.800)**	**(3.687.884.600)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.957.971.800	3.687.884.600
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman pertama kali dibentuk pada Tahun 1982 yang keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kantor Wilayah pada saat itu meliputi wilayah Tangerang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Kemudian untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Tangerang diserahkan kepada Kantor Wilayah Jawa Barat dan kemudian dibentuk pula Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: A.325.KP.04.04 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001

Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah terdiri atas beberapa Divisi. Divisi-divisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Divisi Administrasi,* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;

2. *Divisi Pemasyarakatan,* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah;
3. *Divisi Keimigrasian*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah;
4. *Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 terdapat perubahan identitas entitas akuntansi. Satuan kerja perwakilan imigrasi dan unit pelaksana teknis (UPT) d daerah mengalami perubahan kode Satuan kerja dan kode Eselon I dari semula :

1. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 03 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk UPT Administrasi Hukum Umum (Balai Harta Peninggalan);
2. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 05 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara);
3. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 06 (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk UPT Keimigrasian (Perwakilan Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Deteni Imigrasi).

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah 1 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0100	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	-	1	-	-	1
Jumlah			**-**	**1**	**-**	**-**	**1**

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
    - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah

pelatihan selesai dilaksanakan

  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Nilai asset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan asset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tetntang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dillaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2024 dan 2024. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai Aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi

penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

b. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

d. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (Tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia	10

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak lima kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp. 4,512,406,000 setelah revisi terakhir menjadi Rp. 4,016,866,000. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan anggaran seperti adanya *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, addendum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI

Jakarta. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	4.508.406.000	4.012.866.000
Belanja Modal	4.000.000	4.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**4.512.406.000**	**4.016.866.000**

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berasal dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya yaitu pelepasan aset non lancar dari hasil lelang BMN berupa penjualan BMN Rusak Berat sebesar Rp.0, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari sewa rumah dinas, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara atas kehilangan barang inventaris pada tahun anggaran 1999 sesuai LHP BPK Nomor 70/HP/XIV/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian pembayaran gaji pegawai.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		-	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai		-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	
Jumlah	**-**	**-**	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebesar 0% dibandingkan realisasi TA. 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya, dan dan tidak terdapat denda atas penyelesaian pekerjaan pemerintah pada Semester II Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Sew a Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegaw ai	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegaw ai TAYL	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**-**	**-**	**#DIV/0!**

Realisasi Belanja Negara Rp3,997,559,200

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp3,997,559,200 atau 97,87% dari anggaran belanja sebesar Rp4,016,866,000. Rincian anggaran dan

realisasi belanja Semester II Tahun 2024 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang	4.012.866.000	3.993.624.200	99,52
Belanja Modal	4.000.000	3.935.000	98,38
Belanja Bantuan Sosial	0	0	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	**4.016.866.000**	**3.997.559.200**	99,52
Pengembalian Belanja	-	35.652.400	
Total Belanja	**4.016.866.000**	**4.033.211.600**	**100,41**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

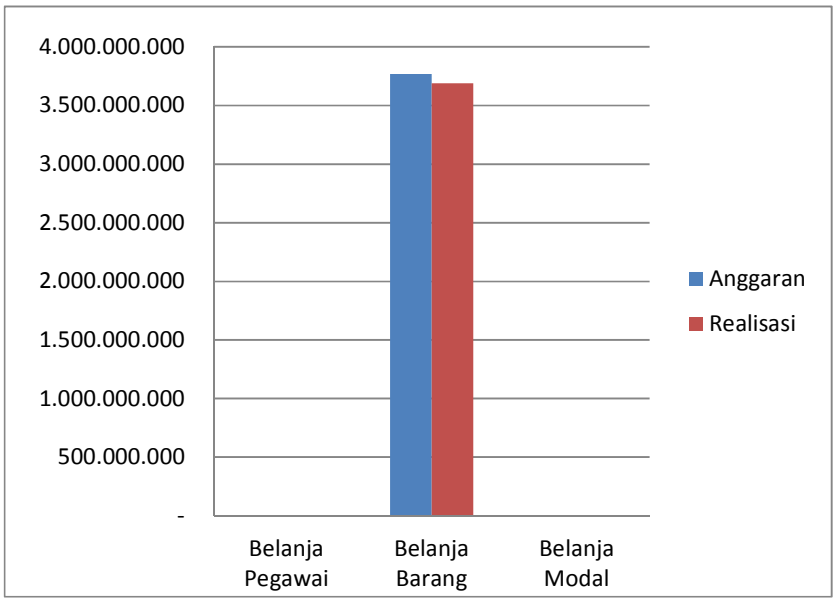

Realisasi Belanja Semester II Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 50.63% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menigkatnya pagu anggaran belanja barang Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 yaitu adanya *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	3.993.624.200	3.687.884.600	8,29
Belanja Modal	3.935.000		#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**3.997.559.200**	**3.687.884.600**	**8,40**

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebesar 0 persen dari realisasi belanja TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain bertambahnya pegawai yang mutasi keluar dari Kanwil DKI Jakarta ke satuan kerja lainnya pada Semester II TA. 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

Belanja Barang

Rp3,993,624,200

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,993,624,200 dan Rp. 2,446,968,950 Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun 2024 mengalami kenaikan 50,0% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain dikarenakan adanya adanya *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024.

Perbandingan Belanja Barang Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Honor	35.300.000	8.800.000	301,14
Belanja Barang Non Operasional lainnya	48.477.000	99.368.800	(51,22)
Belanja Jasa Profesi	3.445.074.400	3.173.604.800	8,55
Belanja Jasa Covid			#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	246.730.000	213.445.300	15,59
Belanja Bahan	35.300.000	192.665.700	(81,68)
Jumlah Belanja Kotor	**3.810.881.400**	**3.687.884.600**	**3,34**
Pengembalian Belanja	35.652.400	6.000.000	
Jumlah Belanja	**3.846.533.800**	**3.693.884.600**	**4,13**

Pada Kantor Wilayah DKI Jakarta DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat anggaran Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja barang non operasional (522131). Realisasi Bantuan Hukum periode 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.812.541.800 atau 87.82% dari Anggaran sebesar Rp. 3.202.728.000 dengan rincian sebagai berikut:

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp3,935,000

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,935,000 dan Rp3.991.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.05% dari Realisasi Belanja Modal TA 2023. Hal ini antara lain dikarenakan menurunnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya (buku)	3.935.000	3.991.500	(1,42)
Jumlah Belanja Kotor	**3.935.000**	**3.991.500**	**-1,42**
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	**3.935.000**	**3.991.500**	**-1,42**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah pada Semester II Tahun 2024 maupun TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan 0% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023. Hal ini antara lain dikarenakan

menurunnya jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta tidak adanya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada tahun anggaran 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester II Tahun 2024 maupun TA. 2023 dikarenakan tidak tersedianya anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester II TA. 2024 dan TA. 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	-	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Semester II Tahun 2024 maupun TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Semester II Tahun 2024 maupun TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A 2022	Naik (Turun)
Belanja Modal Lainnya			#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Semester II Tahun 2024 maupun TA 2023 Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat

untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Papua	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Biak	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Semester II Tahun 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasadalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II Tahun 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang PNBP Rp 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Semester II Tahun 2024 dan 2023

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Semester II Tahun 2024 dan 2023

No	Debitur per Satker	Tahun 2022	Tahun 2021
		-	-
			-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA Semester II Tahun 2024 dan 2023

No	Debitur per Satker	TH 2022	TH 2021
		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing

Piutang Lancar Rp0

sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Semester II Tahun 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secarapenuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka Semester II Tahun 2024 dan 2023

Jenis	TH 2022	TH 2021
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester II Tahun 2024 dan 2023

Jenis	TH 2022	TH 2021
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp.0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II Tahun 2024 dan 2023

Persediaan	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan yang Belum Diregister Rp.0

C.11 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan yang Belum Diregister merupakan akun korolari/akun ikutan yang terbentuk dari Realisasi Belanja Barang Persediaan di aplikasi SAIBA dan Pencatatan Persediaan Masuk dari transaksi pembelian dan transaksi hibah di aplikasi Persediaan. Rincian Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan yang Belum Diregister Semester II Tahun 2024 dan 2023

Persediaan yang Belum Diregister	TH 2022	TH 2021
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Tagihan TP/TGR Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Semester II Tahun 2024 dan 2023

No	Debitur per Satker	Tahun 2022	Tahun 2021
		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.13 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian TPA untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Semester II Tahun 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	5,590,000	0.50%	27,950.00
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**5,590,000**		**27,950.00**
Tagihan PA			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**5,590,000**		**27,950.00**

Tanah Rp.0

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	-
Hibah	Rp	-
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**Rp**	**-**

Tanah yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan data per 31 Desember 2024 seluas 0m^2, dimana saldo awalnya 0m^2 dengan rincian sudah bersertifikat.

Peralatan dan Mesin Rp0

C.16 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Saldo awal	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	-
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2022	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**Rp**	**-**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.17 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Transaksi Normalisasi BMN	-
Saldo per 30 Juni 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**-**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.18 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**-**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2022	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**-**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
		-	0	0	
				0	
	Jumlah	**-**		**-**	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	Rp -
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.22 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	183,250,000
	183,250,000

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2022	**Rp**	**-**
Amortisasi	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**Rp**	**-**

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Lain-Lain Rp0

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
- Penghapusan BMN (BMN yang dihentikan)	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2021	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	**Rp**	**-**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing

Aset Lainnya Rp0

sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	**0**	**0**	**0**
Software	0	0	0
ATB Lainnya	0	0	0
Aset Lain-lain	**0**	**0**	**0**
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2022
1	Uang Muka KPPN	49,800,000
Jumlah		**49,800,000**

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	Rp -
2	Layanan Bantuan Hukum Litigasi	Rp -
	Total	**Rp -**

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Total	**-**	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Semester II Tahun 2024 dan TA 2023

Keterangan	TH 2022	TH 2021
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Utang yang Belum Ditagihkan Rp0

C. 29 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan Semester II Tahun 2024 dan TA 2023

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Utang yang Belum Ditagihkan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C. 30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan utang jangka pendek selain utang kepada pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga dan bagian lancar utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Semester II Tahun 2024 dan TA 2023

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.31 Ekuitas

Ekuitas Rp 0

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**-**	**-**	**#DIV/0!**

Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan atas sewa tanah, gedung dan bangunan dari sewa rusun oleh pegawai dan sewa lahan oleh Bank BRI.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	-	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Persediaan Rp0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Barang dan Jasa Rp. 3,711,241,800

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3,711,241,800 dan Rp 3,474,439,300. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	200600000	208.665.300	#REF!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46130000	4.780.000	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja		0	#REF!
Beban Barang Operasional Lainnya		0	#REF!
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			#REF!
Beban Bahan	218042800	192.665.700	#REF!
Beban Honor Output Kegiatan	35300000	8.800.000	#REF!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	48477000	99.368.800	#REF!
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19		0	#REF!
Beban Langganan Listrik		0	#REF!
Beban Langganan Telepon		0	#REF!
Beban Langganan Air		0	#REF!
Beban Sewa		0	#REF!
Beban Jasa Profesi	31200000	26.400.000	#REF!
Beban Jasa Konsultasi	3413874400	3.147.204.800	#REF!
Beban Jasa Lainnya	3935000	0	#REF!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		19.206.000	#REF!
Jumlah	**3.997.559.200**	**3.707.090.600**	**7,84**

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II TA.2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	**#DIV/0!**

Beban Perjalanan Dinas Rp 213,*445.300*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 283,038,600 dan Rp 211,941,300. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa		2.730.000	#REF!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	200600000	205.935.300	#REF!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46130000	4.780.000	#REF!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		3.185.000	#REF!
Jumlah	**216.630.300**	**#REF!**	**#REF!**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam

bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	**-**	**-**	#DIV/0!
Beban Amortisasi Software			-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**-**	**-**	**#DIV/0!**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**0**	#DIV/0!

Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			#DIV/0!
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai N		0	
Penerimaan Kembali Beban Pegawai TAYL			
Penerimaan Kembali Beban Modal TAYL	0	0	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	**#DIV/0!**

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Defisit Pos Luar Biasa Rp. 3,957,971,800

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
	-3.957.971.800	(3.687.884.600)	7,32
Jumlah	**(3.957.971.800)**	**(3.687.884.600)**	7,32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Surplus/Defisit LO Rp. 3,957,971,800

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar Rp. 3,957,971,800) dan Rp 3,687,884,600. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp1.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan

kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp.0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1. Koreksi Atas Reklasifikasi tersebut berasal dari Reklasifikasi Persediaan/Aset.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Semester II Tahun 2024

Jenis	Nilai Koreksi
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp. 3,957,971,800

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,957,971,800 dan Rp 3,687,884,600. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang

melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.957.971.800
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**3.957.971.800**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp1,315,662,650.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp3.991.500.BUKU

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
			Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Semester II Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp. 0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca Per 31 Desember 2024.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Sesuai instruksi surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.PR.01.04-92 tanggal 03 Desember 2024 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang pencadangan anggaran belanja *(automatic adjustment)* Kementerian/Lembaga pada TA. 2024 setiap K/L agar menyampaikan usulan pemblokiran beserta ADK RKA-K/L yang telah diberikan catatan halaman IV DIPA (blokir) sekurang-kurangnya 5% dari total pagu sumber dana rupiah murni (RM).

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor: W10.KU.03.03-04 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM DKI Jakarta telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Keterangan
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	Kuasa Pengguna Anggaran	Ibnu Chuldun
	Pejabat Pembuat Komitmen	Ronald
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Sorta Delima Lumban Tobing
	Bendahara	Dian Erviana

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memiliki satu rekening virtual Bendahara Pengeluaran pada Bank BRI Kantor Kas Kanwil Depkumham dengan nama rekening BPG 139 Kanwil Kemenkumham Jakarta Raya nomor 650884087201000.

PENJELASAN TAMBAHAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

- ***Penjelasan DIPA mohon dijelaskan terkait berapa kali melakukan revisi DIPA***
- ***Penjelasan Prioritas Nasional (mohon dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya)***

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kantor Wilayah Jakarta DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya diantaranya melalui 3 (tiga) program prioritas, yaitu kegiatan Akreditasi Lembaga, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) dengan pagu mencapai Rp3.432.650.000 dan realisasi sebesar Rp3.413.874.400 atau 99% dari pagu. Rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian output Kegiatan Prioritas Nasional periode 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Akreditasi Lembaga	-	-	#DIV/0!	-			
2	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi)	2.851.000.000	2.833.792.000	99,40				
3	Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi)	581.650.000	580.082.400	99,73	-			
	Jumlah	**3.432.650.000**	**3.413.874.400**	**99,45**	**-**			

- ***Pengembalian Belanja (mohon dijelaskan pada Belanja)***

Pada Tahun 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp.35,652,400 berupa pengembalian belanja barang (sebutkan nama belanja dan kegiatannya) sesuai NTPN xxxxx tanggal xxxxx.

❖ *Capaian Output (mohon dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya)*

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Kantor Wilayah jakarta DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain sebagai berikut:

Contoh :

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013.10.BB	**Program Pembentukan Regulasi**								
5256	**Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah**								
5256.ABD	***Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM***								
ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	63.248.000	63.248.000	100,00	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
5256.BDB	***Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga***								
BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	84.341.000	84.341.000	100,00	1	1	Lembaga	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
Sub Total		**147.589.000**	**147.589.000**	**100,00**					
013.10.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**								
4841	**Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah**								
4841.BDB	***Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga***								
BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	102.777.000	102.772.994	100,00	8	8	Lembaga	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
4841.BDD	***Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat***								
BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	100.988.000	100.985.957	100,00	2	2	Kelompok Masyarakat	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	46.262.000	46.262.000	100,00	5	5	Kelompok Masyarakat	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
4841.BIC	***Pengawasan dan Pengendalian Lembaga***								
BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	78.578.000	78.578.000	100,00	14	14	Lembaga	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
4841.PDE	***Akreditasi Lembaga***								
PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	96.250.000	96.250.000	100,00	14	14	Lembaga	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
4841.QBA	***Layanan Bantuan Hukum Perseorangan***								
QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	############	############	100,00	164	164	Orang	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
4841.QBC	***Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat***								
QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	190.660.000	190.540.000	99,94	18	18	Kegiatan	100,00	CAPAIAN OUTPUT BULAN DESEMBER
Sub Total		**############**	**############**	**99,99**					
Total		**############**	**############**	**99,99**					
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)			- 1.320.000						
Total		**############**	**############**	**99,92**					

- ***Penjelasan PIPK Jika Ada penilaian PIPK pada Tahun 2024 (mohon dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya)***

Pada Tahun 2024 telah dilakukan kegiatan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK nomor 17/PMK.09/2019 dengan akun signifikan xxxxx.

- ***Pergantian KPA Jika Ada (mohon dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya)***

- ***Resiprokal Jika Ada (mohon dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya)***

Pada tahun 2024 terdapat transaksi resiprokal terkait belanja bantuan hukum antara Kantor Wilayah xxxx dan xxxx (penerima) sebesar Rpxxxx. Jika ada selisih mohon dijelaskan terkait selisih tsb.

- ***Temuan BPK/Itjen (mohon dijelaskan pada Tindqk Lanjut Temuan)***

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI JAKARTA

(013.10.408727)

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024

Jl M.T Haryono No. 24

Jakarta, 13630

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 A, Cawang – Jakarta Timur 13630
Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928
Laman : kumham-jakarta.info & jakarta.kemenkumham.go.id
E-mail : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

W.10.KU.05.03- 386 7 Mei 2025
Satu berkas
Penyampaian Laporan Keuangan UAPPA-W
Semester II TA. 2024

Yth. Kepala DJPBN Kanwil Provinsi DKI Jakarta
Jln. Otto Iskandardinata 53-55
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-2543/WPB.12/2015 tanggal 14 Juli hal tersebut pada pokok surat, Bersama ini disampaikan Laporan Keuangan (CaLK) UAPPAW Semester II Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk DIPA BPHN (408727).

Atas perhatian dan kerjasamManya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kasubbag Pengelolaan
Keuangan dan BMN

Ditandatangani secara elektronik oleh :

EVI PURWANINGSIH, S.H., M.H
NIP 197206261992032001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

ESELON I : **(10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0100) DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : **(408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA**

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 4:41 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	3,711,241,800	3,474,439,300	236,802,500	6.816
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	246,730,000	213,445,300	33,284,700	15.594
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

ESELON I : **(10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0100) DKI JAKARTA**

SATUAN KERJA : **(408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA**

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 4:41 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,957,971,800	3,687,884,600	270,087,200	7.324
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,957,971,800)	(3,687,884,600)	(270,087,200)	7.324
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,957,971,800)	(3,687,884,600)	(270,087,200)	7.324
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,957,971,800)	(3,687,884,600)	(270,087,200)	7.324

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Jakarta, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Kantor Wilayah

R. ANDIKA DWI PRASETYA
NIP 196712171991031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 26/02/25 12:33 PM

Tgl Cetak : 26/02/25 4:52 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,957,971,800)	(3,687,884,600)	(270,087,200)	7.32
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,957,971,800	3,687,884,600	270,087,200	7.32
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Jakarta, 26 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Kantor Wilayah

R. ANDIKA DWI PRASETYA

NIP 196712171991031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013**

ESELON I : **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10**

SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA 408727**

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 4:19 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,016,866,000	3,961,906,800	(54,959,200)	98.63	3,772,299,000	3,691,876,100	80,422,900	97.87
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	4,012,866,000	3,957,971,800	(54,894,200)	98.63	3,768,299,000	3,687,884,600	80,414,400	97.87
3. Belanja Modal	4,000,000	3,935,000	(65,000)	98.38	4,000,000	3,991,500	8,500	99.79
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013**

ESELON I : **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10**

SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA 408727**

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 4:19 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**4,016,866,000**	**3,961,906,800**	**(54,959,200)**	**98.63**	**3,772,299,000**	**3,691,876,100**	**80,422,900**	**97.87**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Jakarta, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Kantor Wilayah

R. ANDIKA DWI PRASETYA
NIP 196712171991031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 013**	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I	**: 10**	**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0100**	**DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA	**: 408727**	**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/02/25 4:20 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 26/2/25 4:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	177,725,000	218,146,000	218,042,800	0	218,042,800	99.95	103,200
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	23,300,000	35,300,000	35,300,000	0	35,300,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	48,500,000	48,500,000	48,477,000	0	48,477,000	99.95	23,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	249,525,000	301,946,000	301,819,800	0	301,819,800	99.96	126,200
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	3,928,190,000	3,432,650,000	3,413,874,400	35,652,400	3,378,222,000	98.41	54,428,000
522151	Belanja Jasa Profesi	31,200,000	31,200,000	31,200,000	0	31,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,959,390,000	3,463,850,000	3,445,074,400	35,652,400	3,409,422,000	98.43	54,428,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,821,000	0	0	0	0		0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180,540,000	200,940,000	200,600,000	0	200,600,000	99.83	340,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,130,000	46,130,000	46,130,000	0	46,130,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	299,491,000	247,070,000	246,730,000	0	246,730,000	99.86	340,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,508,406,000	4,012,866,000	3,993,624,200	35,652,400	3,957,971,800	98.63	54,894,200
53	BELANJA MODAL							
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	4,000,000	4,000,000	3,935,000	0	3,935,000	98.38	65,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	4,000,000	4,000,000	3,935,000	0	3,935,000	98.38	65,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,000,000	4,000,000	3,935,000	0	3,935,000	98.38	65,000
	JUMLAH BELANJA	4,512,406,000	4,016,866,000	3,997,559,200	35,652,400	3,961,906,800	98.63	54,959,200

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 4:39 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**0**	**0**	**0**	

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Jakarta, 26 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Kantor Wilayah

R. ANDIKA DWI PRASETYA

NIP 196712171991031002